

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH DI DESA KILONGAN
PERMAI
KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH**

Ismawati Doembana, Samsul Hadi Rahman
Email: ismadoembana84@gmail.com, rakhaazzikry@gmail.com

**Universitas Muhammadiyah Luwuk
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bantuan sosial Pemerintah Daerah kabupaten Banggai dalam pembangunan perumahan di Kilongan permai. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Bansos untuk pembangunan perumahan, Untuk penarikan sampel dilakukan dengan teknik *Porpusive Sampling* karena penelitian ini menyangkut Pelaksanaan Bansos. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bansos dalam pembangunan perumahan di Kilongan Permai Kabupaten Banggai dapat dikatakan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Hasil ini didapatkan dari total keseluruhan sub variable yang dijumlahkan dimana setelah dijumlahkan total keseluruhan skornpresentasinya mencapai 48,56%.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bantuan sosial

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada anggota/keompok masyarakat yang tidak berkaitan dengan melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan resiko sosial. Permendagri Nomor 32 tahun

2011 tentang pemberian bantuan harus memenuhi kriteria, percepatan pembangunan Sulawesi Tengah menguras Rp. 1,2 triliun. Pasal 26 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 memang benar-benar telah mengunci dan menutup pihak pemerintah daerah untuk menafsirkan kepada siapa-siapa bantuan sosial diberikan.

Program pembangunan Inprastruktur pedesaan pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keaddan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Mengamati fenomena yang ada, dapat dikemukakan suatu permasalahan yang cukup signifikan untuk mendapatkan pengkajian lebih lanjut menyangkut Pelaksanaan Bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai khususnya perumahan di Kilongan permai.

2. Metode Kegiatan

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2019. Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri tanpa memuat perbandingan antara variable dengan variable lainnya. Lokasi penelitian Lokasi penelitian di Kilongan permai luwuk utara kabupaten banggai. Populasi Menurut Sugiono (2005:90) yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di kilongan berjumlah 322 orang. Sampel Penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata berjumlah 65 orang.

3. Pelaksanaan

A. Konsep Pelaksanaan

Menurut Westa (1985:17) Bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna

mencapai tujuan yang diharapkan. Dari pengertian yang ada dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan bebrapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan, Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987:40), dipengaruhi oelh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses pelaksanaan/implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkat proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- 4) Struktur birikrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

C. Kriteria pemberian bantuan sosial

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit (Yusranlapananda, wordpress.com)

- a. Selektif,
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus , kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai tujuan Penggunaan

Dalam peraturan Menteri tersebut diantaranya mengatur bahwa daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Yang dapat menerima bantuan sosial juga telah ditentukan yaitu *individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami kedaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimummaupun lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.*

Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan.Sedangkan kriteria persyaratan penerima bantuan adalah memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administrative pemerintahan daerah berkenaan.

D. Konsep Pembangunan Perumahan

Bertitik tolak dari kebijakan pemerintah diatas, maka sudah seharusnya hal ini mendapat perhatian serius dari kalangan pihak pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung perumahan dan permukiman merupakan infrastruktur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Sutan Hidayatsyah, perumahan dan permukiman swadaya ini adalah perumahan atau permukiman yang tumbuh secara bertahap diwujudkan dengan adanya pembangunan rumah-rumah yang dilakukan secara swadaya oleh perorangan, untuk keperluan sendiri maupun keperluan lainnya.

E. Kerangka pemikiran

Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa untuk dapat menerapkan apa yang menjadi kewenangannya. Berbagai factor sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Sejauh dengan uraian diatas maka focus penelitian didasarkan pada alur pikir bahwa pelaksanaan Bantuan sosial pemerintah daerah kabupaten banggai khususnya perumahan dapat diketahui dan tingkatkan jika kita memberikan perhatian lebih pada pelaksanaannya antara lain dengan bagaimana pemerintah desa dalam proses pembangunan perumahan yang ada di desa

4. Hasil Penelitian

Pelaksanaan bansos pemerintah daerah Kabupaten banggai merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan bansos dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsadan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Menurut data yang terdapat selama penelitian observasi di lapangan, dalam pelaksanaan bansos terlihat masyarakat terlibat dengan melakukan musyawarah kegiatan dapat dilihat dengan undangan langsung yang diprakarsai pemerintah desa serta panitia pelaksana bansos untuk melibatkan partisipasi masyarakat maupun instansi pemerintah yang ada di wilayah Kilongan Permai dengan cara mengundang seperti pada pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bansos pemerintah daerah kabupaten banggai khusus perumahan, bantuan sosial ini dapat dikatakan tidak baik pada akibatnya apa yang menjadi tujuan dari program yang telah direncanakan tidak terealisasi dengan baik di karenakan masih belum maksimalnya dalam pelaksanaan bansos seharusnya masyarakat lebih memahami pentingnya program bansos tersebut dalam pelaksanaannya dengan presentasinya mencapai 48,56%.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Pelaksanaan bansos dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsadan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bansos pemerintah daerah kabupaten banggai khusus perumahan, bantuan sosial ini dapat dikatakan tidak baik pada akibatnya apa yang menjadi tujuan dari program yang telah direncanakan tidak terealisasi dengan baik di karenakan masih belum maksimalnya dalam pelaksanaan bansos seharusnya masyarakat lebih memahami pentingnya program bansos tersebut dalam pelaksanaannya dengan presentasinya mencapai 48,56%.

Saran

Peneliti memberikan saran kepada pengurus pelaksanaan bantuan sosial di Kilongan Permai hendaknya melakukan musyawarah dan diadakan pembekalan tentang kepengurusan pelaksanaan bantuan sosial sehingga kinerja pengurus selama mengurus bansos bisa transparantentang segala administrasi kegiatan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan dampaknya pun sampai ke sasaran pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

Anonim *Panduan penyusunan skripsi*..Fisip Unismuh Luwuk,

Arif Budiman *Teori pembangunan Dunia ketiga*.PT.Gramedia, Jakarta, (2000).

Malik, Drs., *Administrasi Pembangunan*. Penerbit Teras.Yogyakarta, 2011

Mifta Thoha, , *Perilaku Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Ndraha, Taliziduhu,. *Pembangunan masyarakat*. Bina Aksara, Jakaqrtq, 2002